



Ancol Diduga Bersekongkol dengan WAIP

JAKARTA (Poskota)- PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA-Ancol) diduga ada persengkongkolan dengan PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) yang terindikasi merugikan publik dan juga negara.

Hal tersebut disampaikan Pengamat Kebijakan Publik, Rully Amirulloh dalam keterangan tertulisnya yang diterima Poskota, Kamis 14 Juli 2022.

Ia mengungkapkan, bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Tata Kelola Perusahaan BUMD dan penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Ancol kepada PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) terkait permasalahan pengalihan kerjasama pembangunan dan pengoperasian sebagian bangunan Music Stadium pada Ancol Beach City.

Dikatakan Rully, sejak Tahun 2020, ketika dipimpin Sahir, PT Pembangunan Jaya Ancol melakukan pembiaran terhadap pelanggaran WAIP hingga adanya rencana ingin memberikan kompensasi ratusan miliar rupiah yang berpotensi adanya tindakan pidana.

"Kami mendesak Pimpinan Ombudsman RI beserta pihak berwenang lainnya untuk memberikan atensi khusus demi menyelamatkan aset daerah," ujar Rully dengan nada geram, Kamis (14/7/2022).

Kemudian, Rully juga mengungkapkan, dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman yang diterbitkan pada 20 Mei 2020, disebutkan jika:

1. WAIP tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu untuk membayar PBB, denda PPN, minimum payment plus dendanya, walaupun Ancol sudah melakukan penagihan kepada WAIP dari periode 2014-2019, terhitung tidak kurang dari 10 M hutang WAIP belum dibayarkan kepada Ancol.

2. Ancol mengakui bahwa dalam kurun waktu 2011-2012, WAIP melakukan wanprestasi dengan melakukan kerjasama kepada pihak lain dalam jangka panjang tanpa sepengetahuan Ancol, padahal pembangunan Music Stadium (MS) belum selesai seluruhnya dan belum ada Berita Acara Serah Terima Gedung dari WAIP kepada Ancol.

Hentikan Kerjasama

Namun, Ancol sudah menyampaikan penjelasan kepada Ombudsman bahwa pihaknya akan menghentikan kerjasama dengan WAIP setelah dilakukannya eksekusi dari Pengadilan Negeri terhadap objek bangunan Ancol Beach City (ABC). Hal itu berdasarkan arahan dari Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tahun 2015.

Lebih lanjut, Rully juga menyebut, bahwa Ombudsman telah melakukan Monitoring LAHP, dengan hasil di antaranya:

1. Pada tanggal 22 Juli 2020 Telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap objek bangunan ABC, namun Ancol masih juga belum mengakhiri kerjasama dengan WAIP.

2. Pada 16 Juli 2020 melalui Berita Acara Monitoring Pelaksanaan LAHP Ombudsman, Ancol kembali mencari-cari alasan (tidak sesuai dengan poin a di atas) dengan menyampaikan bahwa Ancol tidak dapat serta-merta mengambil alih Music Stadium pada Ancol Beach City dan melakukan pemutusan hubungan kerjasama dengan PT. WAIP sebelum adanya putusan Peninjauan

Kembali dari Mahkamah Agung mengenai permasalahan antara PT. MEIS dengan PT. WAIP, mengingat segala resiko dan konsekuensi yang akan berdampak ke Ancol.

3. Secara diam-diam, Ancol kembali berbuat ulah dengan membuat Nota Kesepahaman dengan WAIP pada tanggal 7 Mei 2021 dan berakhir 7 Januari 2022 yang dilakukan oleh para Direksi lama untuk memberikan kompensasi hingga mencapai 250 M.

Namun, beruntung sekitar Oktober 2021 ada pergantian 3 Direksi, sehingga 3 direksi baru tersebut menolak pemberian kompensasi kepada WAIP yang nilainya mencapai ratusan Milliar rupiah.

4. Ancol melalui 3 Direksi baru tersebut berusaha meminta pendapat kepada beberapa lembaga yaitu BPK, BPKP, Kejati, Kejaksaan terhadap permasalahan kerjasama pembangunan, pengalihan, pengoperasian Music Stadium pada Ancol Beach City dari WAIP.

Dari beberapa pendapat Lembaga Negara tersebut, mayoritas merekomendasikan untuk melakukan penghentian kerja sama dengan PT. WAIP.

"Publik berharap, 3 direksi baru terus berani melawan rencana busuk yang dilakukan oleh para direksi lama (termasuk Dirut yang sekarang) sehingga uang rakyat dapat diselamatkan dan layanan publik tidak terganggu," tandas Rully.

Tak hanya itu, dikatakan Rully, bahwa Ombudsman juga sudah menyampaikan permasalahan ini kepada BPBUMD, Inspektorat Pemrov DKI Jakarta hingga Gubernur DKI Jakarta agar layanan publik di Ancol khususnya Gedung ABC dapat bermanfaat buat publik.

"Dengan cara memaksa Ancol menghentikan kerjasama dengan WAIP agar terciptanya Good Governance dan di Oktober 2022 nanti, Gubernur bisa Husnul Khotimah," pungkas Rully.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi Poskota.co.id, Humas Ancol Eko Nugroho mengatakan pihaknya akan mengkroscek terlebih dahulu prihal informasi yang diungkap pengamat tersebut.

"Saya harus kroscek dulu ya," kata Eko saat dikonfirmasi dalam pesan singkatnya. **(Aldi/bu)**